

VARIABEL MAKRO EKONOMI DAN NON *PERFORMING* LOAN: BUKTI EMPIRIS DARI BANK UMUM DI INDONESIA

Amri¹, Rahma Harianti²

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh¹

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh²

E-mail: amry94m@yahoo.com

Abstract

This study is aimed at empirically explores the effect of macroeconomic variables i.e., economic growth, interest rate and the Corruption Perception Index (CPI) on the Non-Performing Loans (NPL) of the commercial banks in Indonesia. An annually data from the years 2003 to 2014 were analysed using the multiple regression model. The study documented that: (i) the economic growth has insignificant effect on the Non-Performing Loans (NPL); (ii) the CPI has a negative significant influence on the Non-Performing Loans; and (iii) the interest rate has a positive significant influence on the Non -Performing Loans (NPL). This findings implied that the central bank of Indonesia (Bank Indonesia) and the government should design together the economic policies and regulations that could prevent increasing in the Non-Performing Loans (NPL) of the commercial banks in the country.

Keywords : *Non-Performing Loans, Economic Growth , Interest Rate, Corruption Perception Index*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh variabel makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga dan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) terhadap kredit macet (NPL) bank-bank komersial di Indonesia. Data yang digunakan adalah tahunan dari tahun 2003-2014 yang dianalisis menggunakan model regresi berganda. Hasil studi ini menunjukkan bahwa: (i) pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan pada Kredit Macet; (ii) CPI memiliki pengaruh signifikan negatif pada Kredit Macet; dan (iii) tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kredit Macet. Temuan ini menyiratkan bahwa bank sentral (Bank Indonesia) dan pemerintah harus merancang bersama-sama kebijakan ekonomi dan peraturan yang bisa mencegah peningkatan kredit macet bank-bank komersial di Indonesia.

Kata Kunci : *Non-Performing Loans, Pertumbuhan Ekonomi, BI rate, Indeks Persepsi Korupsi*

PENDAHULUAN

Bank sebagaimana lembaga keuangan lainnya dan perusahaan memiliki motif untuk memperoleh *return* (hasil usaha) yang selalu dihadapkan dengan resiko, yang dikenal dengan istilah resiko kredit.

Resiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi bank apabila tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya. Resiko kredit adalah resiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *counterparty* lainnya (Ali, 2006: 27). Resiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (*Non-Performing Loan*), karena ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, salah satunya adalah kegagalan perbankan dimana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPL.

Kredit merupakan salah satu jalan keluar bagi setiap orang yang kekurangan modal untuk setiap kegiatan ekonominya, tentunya hal ini tidak akan terlepas dari kegiatan perbankan. Karena modal yang tidak cukup akan membuat pilihan kepada pelaku ekonomi untuk mencari modal di bank atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk jasa kredit.

Perbankan sebagai intermediasi pengalokasian dana memiliki pendapatan terbesar dari suku bunga dalam kredit. Maka dari itu pihak bank harus lebih berhati-hati untuk menyeleksi calon debitur. Prinsip-prinsip pengkreditan pun harus dilakukan agar terhindar dari kredit bermasalah. Di bawah ini adalah data kredit bermasalah dari tahun 2011-2014.

Tabel 1
Pertumbuhan Kredit Bermasalah pada Bank Umum di Indonesia
dari Tahun 2011-2014

Tahun	NPL (Rp miliar)	Total Kredit (Rp miliar)	Rasio NPL (%)
2011	47,694	2.224.402	2.14
2012	50,595	2.853.023	1.77
2013	58,279	3.455.071	1.69
2014	79,388	3.800.650	2.09

Sumber : Statistik Bank Indonesia 2014, diolah

Tabel 1 menunjukkan peningkatan kredit bermasalah atau NPL meningkat dari tahun ke tahun. Rasio NPL pada tahun 2012 menurun menjadi 1,77 persen dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2013 rasio NPL menurun lagi yaitu sebesar 1,69 persen. Tapi pada tahun 2014 NPL mengalami lonjakan, rasio NPL menjadi sebesar 2,01 persen dan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya NPL adalah *BI rate*. Pada tahun yang sama terjadinya peningkatan pertumbuhan NPL yaitu tahun 2014, *BI rate* meningkat hingga 7,75 persen dan hal ini berujung kepada masyarakat dengan ketidakmampuannya untuk membayar kredit sehingga menyebabkan *Non-Performing Loan* atau kredit bermasalah meningkat.

Indonesia sebagai negara yang berkembang yang masih mengandalkan struktur perekonomian yang masih bercorak agraris yang cenderung masih sangat rentan dengan adanya goncangan terhadap kestabilan kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian selalu menjadi perhatian yang paling penting dikarenakan apabila kegiatan perekonomian dalam kondisi tidak stabil maka akan timbul masalah-masalah ekonomi seperti inflasi yang meningkat, pendapatan masyarakat yang menurun, lapangan kerja sempit, likuiditas perekonomian macet dan tingkat suku bunga tidak stabil.

Non-Performing Loans atau kredit bermasalah yang semakin meningkat membuat kinerja perbankan menjadi lemah, dan variabel makroekonomi memiliki hubungan dengan naik atau turunnya *Non-Performing Loans* seperti Pertumbuhan Ekonomi, BI *rated* dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, BI *rated* dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap *Non-Performing Loans* (Kredit Bermasalah) pada bank umum di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian *Non-Performing Loan*

Berbagai pendapat yang mengemukakan definisi tentang kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan*. Seperti yang dijelaskan oleh Siamat (2004: 86) bahwa kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan akibat adanya kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kreditur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Dan menurut Sunindyo dan wijayanti (2010) kredit bermasalah adalah debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo karena disebabkan berbagai faktor. Kredit bermasalah sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu rasio untuk mengukur kualitas kredit. Rumus perhitungan rasio NPL adalah sebagai berikut (Budisantoso, 2006):

$$\text{Rasio NPL} = (\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100\% \quad (2.1)$$

Timbulnya kredit bermasalah karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yang memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Kredit-kredit yang disalurkan jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan. Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, maka Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal (Budisantoso, 2006).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan indikator pendapatan nasional. Pengertian pendapatan menurut Muana Nanga (2005, 274) adalah tingkat kemakmuran suatu Negara yang diukur dengan *Gross Domestic Product*. Jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh produknya, tingkat pendapatan perkapita dapat diketahui dengan membagi jumlah PDB yang dicapai dengan jumlah penduduk. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan produksi yang memakai faktor-faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal dan skill, perusahaan melakukan kegiatan memerlukan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat (Sukirno, 2006)

BI Rate

Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang, imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “pokok utang” (*principal*). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut “suku bunga” (Budisantoso, 2006). Keynes berpendapat, bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dalam menentukan tingkat suku bunga berlaku hukum permintaan dan penawaran. Apabila penawaran uang tetap, semakin tinggi pendapatan nasional semakin tinggi tingkat suku bunga. Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan (Mankiw, 2003).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu. Pada korupsi tersangkut tiga pihak, pihak pemberi, penerima dan objek korupsi. Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 2, Ayat 1

disebutkan: Perbuatan korup diartikan sebagai tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Sindhudarmoko, 2001).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah instrument yang dikeluarkan oleh Transparency International. Nilai IPK merupakan persepsi pengusaha multinasional, jurnalis keuangan internasional dan masyarakat domestik, sangat sulit dimanipulasi karena melibatkan banyak pihak yang diluar kemampuan pemerintahan suatu negara. Nilai IPK menjelaskan posisi ranking persepsi suatu negara dalam hal aktivitas keberadaan korupsi yang diberikan oleh masyarakat internasional. IPK mempunyai nilai 0-10, nilai 0 untuk yang paling tinggi korupsinya, nilai 10 paling bersih. Dari nilai IPK maka tersusun ranking dari 179 negara didunia yang dinilai. Negara maju dan berkembang umumnya nilai IPK-nya lebih dari 5, Negara terbelakang atau baru berkembang nilainya kurang dari 3 (Sindhudarmoko, 2001).

Penelitian Sebelumnya

Messai, dkk (2013) melalui metode multicollinearity, meneliti dengan pembahasan *Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans* menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB dan pengembalian aset lembaga kredit memiliki dampak negatif pada kredit bermasalah. Tingkat pengangguran dan tingkat bunga riil mempengaruhi pinjaman. Pada prinsipnya, bank harus mempertimbangkan daya saing internasional dengan perekonomian nasional, karena jika daya saing ini tingkat rendah, hal ini bisa mempengaruhi kemampuan peminjam untuk beberapa sektor ekspor untuk membayar utang (Dash dan Kabra, 2010).

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Abadi, Achsani, Rachmina (2014) melalui metode Vector Error Correction Model (VECM) yang meneliti *Dynamics of Non-Performing Loan in Indonesian Banking Industry: A Sensitivity Analysis using VECM Approach* mengemukakan bahwa hubungan positif terhadap NPL, baik di tingkat agregat moneter. Variabel impor memiliki hubungan negatif dengan NPL, ditemukan bahwa sektor pertambangan sangat sensitif terhadap suku bunga, sementara Pertanian cukup sensitif tidak hanya dengan suku bunga tetapi juga pada variabel impor. Sementara sektor perdagangan sensitif karena nilai tukar. Disimpulkan bahwa tingkat suku bunga adalah variabel dominan yang mempengaruhi NPL.

Selain itu, Badar dan Javid (2013) juga melakukan penelitian dengan judul *Impact of Macroeconomic Forces on Nonperforming Loans: An Empirical Study of Commercial Banks in Pakistan*. Studi ini mengkaji panjang dan pendek jangka dinamika antara kredit bermasalah dan makrovariabel ekonomi

yang mencakup periode dari Januari 2002 sampai Desember 2011 dari bank umum di Pakistan. Variabel ekonomimakro termasuk inflasi, nilai tukar, suku bunga, produk domestik bruto dan jumlah uang beredar. Hubungan jangka panjang yang ditemukan di antara variabel dengan menggunakan Johansen dan Juseliuskointegrasi multivariat. Sementara kointegrasipair wise bivariate mengungkapkan hubungan jangka panjangantara kredit bermasalah dengan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Granger uji kausalitas digunakan untuk mengevaluasisebab dan akibat hubungan dalam sampel. Granger menunjukkan inflasi dan nilai tukar yang disebabkanKredit bermasalah. Dinamika jangka pendek dieksplorasi oleh kesalahan vektor correction model. Ini menyatakan bahwa lemahhubungan jangka pendek ada di antara Kredit bermasalah dengan inflasi dan nilai tukar. Indikator makroekonomi adalah penentu yang cukup besar dari kredit bermasalah. Pembuat kebijakan peka kepada penelitian ini karena untuk melihat dampak yang memperparah ekonomi dari *non-performing loan*. Karena akan mengganggu kesehatan profitabilitas dankeseluruhan sistem keuangan saat merumuskan kebijakan fiskal dan moneter.

Begitu pula dengan Ahmad dan Bashir (2013) melakukan penelitian dengan menganalisis kekuatan penjelas dari variabel makroekonomi sebagai penentu dari NPL. Penelitian ini menggunakan data time-series dari rasio NPL dan sembilan variabel makroekonomi selama periode 1990-2011. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio NPL. Variabel independen yang digunakan adalah *growth in GDP*, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, *effective exchange rate*, *consumer price index*, ekspor. Metode penelitian yang digunakan adalah ordinary least square. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan signifikan negative antara *GDP growth*, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, ekspor dan produksi industry dengan NPL. Selain itu ditemukan hubungan signifikan positif antara *consumer price index* dengan NPL. Namun, variabel lain tidak signifikan.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah di bahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian awal yaitu; di duga Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memiliki hubungan yang negatif terhadap *Non-Performing Loans* (Kredit Bermasalah). Sedangkan *BI Rate* memiliki hubungan yang positif terhadap *Non-Performing Loans* (kredit bermasalah).

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel makroekonomi yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, *BI Rate* dan IndeksPersepsi Korupsi (IPK) terhadap *Non-Performing Loans*(Kredit Bermasalah) pada bank umum di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2003-2014 dalam bentuk tahunan. Data yang di kumpulkan dari beberapa sumber yaitu Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan *World Bank* dan data dokumentasi lainnya yang relevan dengan topik permasalahan penelitian ini.

Model Analisis Data

Model analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, BI *rate* dan Persepsi Indeks Korupsi (IPK) terhadap *Non-Performing Loans* pada bank umum di Indonesia, secara matematis hubungan antar variabel dinyatakan sebagai berikut:

$$NPL = \beta_0 + \beta_1 EGWR + \beta_2 BIR + \beta_3 IPK + \varepsilon_t \quad (3.3)$$

Dimana:

NPL = *Non-Performing Loans* (Kredit Bermasalah)
EGRW = Pertumbuhan Ekonomi
BIR = BI *rate*
IPK = Indeks Persepsi Korupsi
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
 ε_t = *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Secara teoritis telah diungkapkan bahwa salah satu metode pendugaan parameter dalam model regresi linear adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini digunakan berlandaskan pada sejumlah asumsi tertentu. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, pada prinsipnya model regresi yang dibangun tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE (*Best, Linear, Unbiased, and Estimator*), dalam arti lain model yang dibangun harus bebas dari penyimpangan asumsi seperti uji normalitas, multikolineritas autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Menurut Ishomuddin (2010), uji normalitas digunakan untuk melihat apakah variabel bebas dan variabel tak bebas terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dapat diketahui dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* (JB) lebih besar dari probabilitas 5 persen (0,05) maka residual data terdistribusi secara normal dan sebaliknya jika nilai *p-value Jarque-Berra* lebih kecil dari 5 persen (0,05) maka residual data tidak terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah model yang terdistribusi secara normal.

Hasil uji normalitas pada Tabel 2 diperoleh nilai *p-value* Jarque-Berra (JB) sebesar 0.738. Nilai *p-value* Jarque-Berra (JB) lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 2
Hasil Estimasi Uji Normalitas

	Jarque-Berra	P-value
NPL	0.6073	0.738

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SHAZAM (2015)

Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi penelitian ini ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolineritas dapat diketahui melalui koefisien korelasi masing-masing variabel. Berdasarkan Tabel 1 diketahui masing-masing variabel memiliki hubungan yang rendah, menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas dalam persamaan regresi linear berganda.

Tabel 3
Matrik Koefisien Korelasi

Variabel	EGRW	BIR	IPK	Constant
EGRW	1.0000			
BIR	-0.037657	1.0000		
IPK	0.29795	0.53476	1.0000	
Constant	-0.65090	-0.67438	-0.46342	1.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SHAZAM (2015)

*Variabel Konstan adalah *Non-Performing Loan* (NPL)

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dipakai untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode (*t*) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (*t-1*). Pengujian autokorelasi dapat menggunakan metode pengujian yang dikembangkan oleh ahli statistik Durbin-Watson. Uji tersebut dikenal dengan uji statistik *d* Durbin-Watson. Uji ini diperoleh dengan membandingkan nilai statistik *d* dengan nilai batas d_U dan d_L yang tergantung pada jumlah observasi *n* dan jumlah variabel penjelas. Batas-batas tersebut untuk *n* yang berkisar dari 6 hingga 200, dan sekitar 20 variabel penjelas yang telah ditabulasi oleh Durbin-Watson (Gujarati, 2012:35).

Hasil estimasi uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson (DW) didapat nilai untuk *d* yang diestimasi bernilai 2.2090 menunjukkan tidak ada keputusan. Tabel Durbin-Watson, diketahui untuk 12 observasi dan 3 variabel penjelas, nilai d_L sebesar 0.6577 dan nilai d_U sebesar 1.8640.

Berdasarkan Tabel 4 karena nilai d lebih besar dari nilai $4 - d_U$ dan lebih kecil dari $4 - d_L$ ($2.136 \leq 2.2090 \leq 3.3423$) maka tidak ada keputusan pada H_0 .

Untuk memperbaiki autokorelasi yaitu dengan menggunakan remedial (*correction*) dilakukan dengan teknik transformasi derajat satu (*first-difference transformation*) seperti yang disarankan Gujarati (2011:105). Setelah dilakukan teknik transformasi derajat satu dan didapat nilai untuk d yang diestimasi bernilai 2.0147 menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi serial baik positif maupun negatif. Berdasarkan Tabel 4 karena nilai d lebih besar dari nilai d_U dan lebih kecil dari nilai $4 - d_U$ ($1.8640 < 2.0147 < 2.1360$) maka tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.

Tabel 4
Aturan Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson

Hipotesis H_0	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak H_0	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak H_0	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif	Terima H_0	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber : Gujarati, Damodar N. *dasar-dasar ekonometrika*, edisi lima 2012.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk menguji heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji *white test*.

Apabila *p-value white test* lebih besar dari 5 persen maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila *p-value white test* lebih kecil dari 5 persen maka terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung heteroskedastisitas (Ishomuddin, 2010).

Uji terhadap heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah di dalam model regresi terdapat kesamaan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya, uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari uji *white test*. Dari uji, *p-value white test* adalah sebesar 0.43908, berarti *p-value white test* lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas

	P-value <i>white test</i>	Obs R - Square
NPL	0.43908	0.9124

Sumber : hasil pengolahan data melalui data SHAZAM (2015)

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, terlihat bahwa tidak ada asumsi yang dilanggar karena data terdistribusi secara normalitas, tidak ada masalah dalam multikolineritas, tidak ada autokorelasi dan tidak terdapat heteroskedastisitas sehingga estimator bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

Analisis Regresi

Hasil estimasi diperoleh dari pengolahan melalui aplikasi ekonometrika yaitu SHAZAM. Metode analisis dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode analisis regresi linier berganda.

Sebelum melakukan pengujian model regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya masalah dalam uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Apabila terdapat penyimpangan pada asumsi klasik, maka uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid.

Hasil regresi untuk kredit bermasalah atau NPL ternyata tidak melanggar asumsi klasik berdasarkan hasil estimasi OLS pada Tabel 6 diperoleh bahwa:

1. Pertumbuhan Ekonomi (EGRW) mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kredit bermasalah dengan nilai koefisien yang ditunjukkan sebesar minus 0,41154. Pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Pendapatan menunjukkan kemampuan peminjam untuk membayar kreditnya, tetapi keputusan untuk membayar kredit itu tidak kepada pendapatannya melainkan kepada masyarakat itu sendiri untuk mau membayar kreditnya atau tidak.

Tabel 6
Hasil Estimasi Model OLS

Variabel	Koefisien estimasi	Standar error	T _{-hitung}	P-value	Hub	Kesimpulan
EGRW	-0.41154	0.3454	-1.192	0.268	-	Tidak signifikan
BIR	0.44140	0.1197	3.686	0.006	+	Signifikan
IPK	-2.3906	0.4642	-5.150	0.001	-	Signifikan
Constant	8.9068	2.496	3.569	0.007	+	Signifikan
R-Square	: 0.9124					
R-Square Adjusted	: 0.8795					
DW	: 2.0147					
F hit	: 0.000					

Sumber: Hasil Pengolahan Data Melalui SHAZAM (2015)

2. BI rate (BIR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL atau kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai koefisien yang ditunjukkan sebesar 0,44140. Artinya jika BIR meningkat 1 persen maka kredit bermasalah akan meningkat

pula sebesar 0,44140 persen. Semakin meningkat BI *rate* maka kredit bermasalah atau NPL juga akan semakin meningkat karena dengan meningkatnya BI *rate* akan melemahkan kemampuan debitur untuk mengembalikan kreditnya.

3. Selanjutnya *Corruptor Perseption Indeks* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL atau kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai koefisien yang ditunjukkan sebesar minus 2,3906. Artinya jika IPK meningkat 1 persen maka kredit bermasalah akan menurun sebesar 2,3906 persen. Kurangnya kekuatan hukum di Indonesia dan juga manajemen perbankan sehingga lalai dengan berbagai tindak moral hazard masyarakat sipil atau pejabat tinggi negara seperti korupsi. Dalam penelitian ini data korupsi adalah dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yaitu 0 sampai 10, dimana 0 untuk Negara korupsi dan 10 untuk Negara bebas korupsi. Semakin menurunnya IPK maka kegiatan perekonomian terhambat, karena kesenjangan pendapatan, ingkar janji dan ketidakjujuran debitur dalam upaya membayar kreditnya sehingga berdampak terhadap kredit bermasalah atau NPL begitu juga sebaliknya.
4. Nilai R-square dari hasil regresi sebesar 0.9124 yang berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 91,24 persen, sedangkan 8,76 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian seperti ketegakan hukum yang lemah, kurang ketatnya manajemen perbankan untuk memilih calon debitur, juga kurang kerja sama antar Bank Indonesia dan pemerintah pusat dalam mengatur atau mengelola stabilitas kelancaran perekonomian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (EGRW) berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan tingkat α sebesar 0,268 terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) dengan nilai koefisien yang ditunjukkan sebesar minus 0,41154. Pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan pendapatan perkapita meningkat, tetapi keputusan untuk membayar lebih kepada perilaku debitur untuk mau membayar atau tidak.
2. BI *rate* (RRI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL atau kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai koefisien yang ditunjukkan

sebesar 0,44140. Semakin meningkat BI *rate* maka kredit bermasalah atau NPL juga akan semakin meningkat dan akan melemahkan kemampuan debitur.

3. *Corruptor Perseption Indeks* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *Non-Performing Loans* (NPL) atau kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai koefisien yang ditunjukkan sebesar minus 2,3906. Semakin tinggi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan sebuah Negara bebas dari korupsi dan kredit bermasalah akan menurun.
4. Nilai R-square dari hasil regresi sebesar 0,9124 yang berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 91,24 persen, sedangkan 9,76 persen dijelaskan oleh variabel lain.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya mencapai perekonomian yang lancar, dan bebas dari kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL), diharapkan pada pihak moneter untuk tidak menaikkan suku bunga yang terlalu tinggi dan memilih kebijakan lain yang paling efektif untuk dapat menstabiliskan kegiatan ekonomi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah harus dengan sangat tegas mengawasi badan hukum yang membasmi korupsi agar terhindar dari indeks persepsi korupsi (IPK) yang terlalu tinggi untuk mengamankan stabilitas politik, sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S., Achسانی, A. N., & Rahmina, D. (2014). The Dinamycs of Non-Performing Loan in Indonesia Banking Industry: A Sensitivity Analysis Using VECM Approach. *Internasional Journal of Education and Research*, 2(8), 121-140.
- Ade, A., & Edia, H. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Ali, M. (2006). *Managemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badar, M., & Javi, A. Y. (2013). Impact of Macroeconomic Forces on Non-Performing Loans: An Empirical Study of Commercial Banks in Pakistan. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 10(1), 40-48.

- Budisantoso, T., & Sigit. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Djohanputro, B., & Kountur, R. (2007). *Non-Performing Loan (NPL)*. Yogyakarta: BPFE.
- Efendi, R. (2014). *Metode Penelitian*. Banda Aceh: DIKTAT FE Unsyiah.
- Endang, N. (2011). Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBSI), Non-Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(1), 1-124.
- Fawad, A., & Bashir, T. (2013). Explanatory Power of Macroeconomic Variables As Determinants of Non-Performing Loans: Evidence Form Pakistan. *World Applied Sciences Journal*, 22(2), 243-255.
- Ginting, E. (1999). Tax Evasion in A Corrupt Economy. *Centre of Policy Studies and the Impact Project*, 1(3), 1-32.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. (4, ed.) Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Gujarati, D.N. (2011). *Econometrics By Example*. (1, ed) New York: Palgrave Mac Millan.
- Harrison, S. (2002). *Riset Pemasaran*. Jakarata: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, M. S. (2005). *Dasar-Dasar Perbankan* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indonesia, B. (2012.). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)*. Retrieved April 21, 2015, From Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/default.aspx>
- Indonesia, B. (2014.). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)*. Retrieved maret 25, 2015, from bank indonesia: <http://www.bi.go.id/statistik/seki/terkini/riil/contents/default.aspx>
- Indonesia, B. (2014.). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)*. Retrieved Maret 25, 2015, From Bank Indonesia: www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/
- Indonesia, B. (2014). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)*. Retrieved Mei 9, 2015, From Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/contents/default.aspx>
- Indonesia, R. (1992). Undang-undang republik indonesia no. 17 tahun 1992 tentang perbankan. *Undang-undang republik indonesia*. Jakarta, indonesia: seketariat negara.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Undang-Undang Republik Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Seketariat Negara.
- Irawati, S. (2006). *Manajemen Keuangan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ishomuddin, & Pujiyono. (2010). *Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Dalam dan Luar Negeri terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)*. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (6 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan* (10 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaufmaan, D., & Krayy, A. (2008). *Agregrating Governance*. Washington: World Bank.

- Klitgaard, R. (2001). *Controlling Corruption*. (Hermoyo, trans.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: BPFE.
- Langi, T. M., Siwu, H., & Masinambow, v. (2014). Analisis Pengaruh Suku Bunga BI, jumlah Uang Beredar, dan Tingkat Kurs terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14, 273-293.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi* (6 ed.). (I. Nurmawan, trans.) Washington: Harvard University.
- Mauro, P. (1997). Why Worry About Corruption. *Economic Issues*, 1(6), 1-13.
- Messai, A. S. (2013). Micro and Macro Determinants of Non-Performing Loans. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(4), 852-860.
- Mustafa, H. (2011). *Korupsi, Pembangunan Manusia dan Perkembangan Moral*. Retrieved Mei 3, 2015, from Hasan Mustafa: <http://www.hasanmustafa.blogspot.com/2011/08/korupsi-pembangunan-manusia-dan.html?m=1>
- Nanga, M. (2014). *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (2 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter* (2 ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Nopirin. (2009). *Ekonomi Moneter ii*. Yogyakarta: BPFE.
- Puspoprato, S. (2004). *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep, Teori dan Realita*. Jakarta: LP3ES.
- Rusydi. (2002). *Pertumbuhan Kredit terhadap Pertumbuhan Laba*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan* (5 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (15 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2008). *Makroekonomi, Teori dan Pengantar* (3 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunindyo, A., & Aprillia, W. A. (2010). Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 54-59.
- Waluyo, J. (2010). Analisis Hubungan Kausalitas antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara. *Jurnal Buletin Ekonomi*, 8(2), 70-86.
- Widyago. (2011, april). *Pengertian Kependudukan*. Retrieved juni 30, 2015, from Pengetahuan Ekonomi: <http://widyago.wordpress.com/2011/04/03/pengertian-kependudukan->
- Wijono, W. W., & Amir, H. (2005). Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Data Sektoral Menggunakan Time-Series Analisis. *Jurnal Keuangan dan Moneter*, 8(2), 1-16.